

ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) DI KABUPATEN INDRAMAYU

Mulyati Kartini

FISIP – Universitas Wiralodra, Indramayu

Email: moelyatikartini@gmail.com

ABSTRAK:

Dalam tulisan ini mendeskripsikan bagaimana penerapan sebuah sistem informasi manajemen pemerintahan daerah yang berbasis teknologi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Informasi Keuangan Daerah. Tulisan ini menggunakan metode literatur dimana penulis mengumpulkan data-data sekunder mulai dari peraturan perundangan yang sesuai dengan fokus kajian tulisan ini, juga hasil dari pemikiran-pemikiran orang lain berbentuk buku dan hasil penelitian berupa jurnal.

Salah satu pemerintah daerah yang telah menerapkan sistem informasi manajemen daerah adalah Kabupaten Indramayu berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa dalam pelaksanaannya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu telah menyusun satu set laporan keuangan yaitu terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) maupun berbagai laporan finansial lainnya seperti Rencana Kerja Anggaran (RKA), Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan, jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca untuk bagian akuntansi dan pelaporan.

Kata kunci: Penerapan, Aplikasi SIMDA, Informasi Manajemen.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran (PA) diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data keuangannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan total volume anggaran dan belanja daerah (APBD) dari tahun ke tahun. Berdasarkan data ringkasan APBD tahun 2019 Provinsi Jawa Barat, total volume pendapatan daerah mencapai 34,88 triliun persen tahun 2018 dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 36,03 triliun setara 3,31 persen. Oleh karena itu untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah wajib dalam memanfaatkan teknologi informasi, hal tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang informasi keuangan daerah.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) Keuangan. SIMDA Keuangan dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja.

Dalam rangka mengemban amanat PP Nomor 65 tahun 2010 untuk memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan SIMDA Keuangan, sebanyak 27 pemerintah daerah

di Provinsi Jawa Barat telah menerapkan SIMDA, salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang telah berhasil menerapkan SIMDA Keuangan secara menyeluruh.

Tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan ini adalah untuk menghasilkan laporan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dalam proses penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah di Kabupaten Indramayu.

KAJIAN TEORITIS

Sistem Informasi Manajemen (SIM)

SIM menurut Chusing (dalam Jogiyanto, 1999:4) adalah “suatu perpaduan antara manusia dan berbagai sumber daya modal dalam organisasi yang bertanggung jawab pada suatu proses pengumpulan dan pengolahan data sehingga dapat memberikan sebuah gambaran informasi yang memiliki manfaat dalam semua tingkatan manajemen”.

Sutanta (2003:43), “SIM yang baik dapat berkontribusi pada proses-proses perencanaan, pengendalian serta proses pengambilan keputusan”. SIM pada proses perencanaan adalah berbentuk dukungan analitik dan persamaan model, input data berlandaskan pada data historis serta kemampuan memanipulasi data melalui teknik peramalan serta ekstrapolasi. SIM pada tahap pengendalian berkaitan dengan analisis perbedaan antara prestasi dengan standar yang ada. Sutanta (2003:50) SIM dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan tiga hal yaitu Penelusuran masalah, desain pemecahan masalah, pemilihan serta pengujian cara dalam pemecahan permasalahan.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Aplikasi SIMDA yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya

Menurut Anwar, (2004:112) SIMDA adalah sistem manajemen informasi pemerintah daerah yang merupakan subsistem dari Sistem Informasi Manajemen Dalam Negeri (SIMDAGRI) yang mendukung kebutuhan informasi bagi penyelenggaraan fungsi utama dan penunjang bagi pemerintah daerah yang terintegrasi secara baik. Pendapat lain menyatakan “Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan” (Djaja, 2009).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah merupakan bagian dari seluruh hak ataupun kewajiban daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahnya yang dinilai dengan uang maupun semua bentuk kekayaan yang berkaitan terhadap semua hak maupun kewajiban daerah tersebut.

METODOLOGI

Dalam tulisan ini menggunakan metode literatur, dimana penulis mengumpulkan data-data sekunder dari pertaruran perundangan yang sesuai dengan fokus kajian tulisan ini juga hasil dari pemikiran-pemikiran orang lain berbentuk buku dan hasil penelitian berupa jurnal. Menurut Burhan Bungin (2008:121) “metode literatur adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data histories”. Sedangkan menurut Sugiyono, (2005:238) menyatakan bahwa “Literatur merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.

PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah di Kabupaten Indramayu

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu dengan menggunakan Aplikasi Simda Versi 2.1, isi dari aplikasi tersebut yaitu mencakup pengumpulan data keuangan, perencanaan anggaran, pertanggungjawaban serta pelaporan anggaran. Sehingga jika dikaitkan dengan apa yang diungkapkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bahwasannya SIMDA Keuangan mencakup penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan maka dari itu telah terjadi kesesuaian didalamnya. Di dalam aplikasi SIMDA Keuangan sudah dapat menjalankan prosedur Administrasi keuangan mulai dari proses penganggaran hingga pelaporan, serta hal-hal yang mendasar berkaitan dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) seperti perincian program anggaran yang digunakan dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa penerapan SIMDA Keuangan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu memberikan perubahan yang besar dalam memanfaatkan aplikasi tersebut, sehingga lebih memudahkan dalam melakukan pengelolaan keuangan termasuk didalamnya pelaporan keuangan, dengan adanya SIMDA efisiensi terkait waktu dan prosedur pengelolaan keuangan secara langsung akan lebih mempercepat capaian tujuan organisasi, dimana SIMDA Keuangan memiliki peran dalam membantu individu dalam melakukan pekerjaannya dimulai dari tingkatan manajemen bawah hingga individu pada tingkat manajemen atas yaitu pimpinan dalam pengambilan keputusan, diaman keputusan sangat berpengaruh kepada efektivitas suatu organisasi, sehingga hal tersebut sesuai dengan pendapat Gibson dalam Satries (2011:33) bahwa efektivitas terbagi menjadi tiga yaitu efektivitas individu, efektivitas kelompok, dan efektivitas organisasi.

Manfaat Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah di Kabupaten Indramayu

Lahirnya sebuah kebijakan harus membawa perubahan ke arah yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan manfaat secara langsung untuk organisasi maupun individu. Pemanfaatan SIMDA yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu telah memberikan kemudahan dalam mengelola laporan keuangan daerah, maka manfaat yang dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan menggunakan aplikasi SIMDA versi 2.1, sebagai berikut :

1. Dapat dipercaya

Dari hasil penelaahan diperoleh hasil bahwa laporan yang dihasilkan melalui SIMDA Keuangan selama ini dapat dipercaya, sesuai dengan hasil analisis bahwa terdapat proses verifikasi ataupun pembahasan yang dilalui sebelum dilakukan pencairan, sehingga secara bersamaan laporan keuangan telah sesuai mengingat jika terjadi kesalahan pasti telah terdeteksi pada saat dilakukannya verifikasi terkait pencairan aliran dana.

2. Ketepatan

Jika ditelaah dari ketepatan bentuk laporan keuangan terkait format dan bentuk laporan maka SIMDA Keuangan sudah memenuhi itu mengingat SIMDA Keuangan telah mengacu pada peraturan dan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Salah satu proses yang dilalui adalah di sebut rekonsiliasi yaitu pencocokan data-data transaksi yang ada.

3. Tepat Waktu

Diterapkannya SIMDA Keuangan ini maka runtutan proses penganggaran hingga penyusunan laporan keuangan menjadi lebih tepat waktu dan ringkas, ini dikarenakan sistem SIMDA Keuangan bersifat otomatis sehingga data hanya perlu satu kali entry kemudian data tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya.

4. Bentuk-Bentuk Laporan

Berdasar pada hasil penelaahan bahwa di dalam SIMDA Keuangan di Kabupaten Indramayu, mampu ditampilkan dalam bentuk yang sesuai dengan format yang telah memenuhi semua kriteria didalam Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri no. 59 tahun 2007, juga telah sesuai seperti format Standar Akuntansi Pemerintah yang tertuang pada PP No. 24 tahun 2005. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Indramayu telah Hasil penelitian SIMDA Keuangan memenuhi apa yang telah diatur menurut peraturan perundangan-undangan bahwa Komponen penyusunan yang terdapat pada satu set laporan keuangan yaitu terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) maupun berbagai laporan finansial lainnya seperti

Rencana Kerja Anggaran (RKA), Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan, jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca untuk bagian akuntansi dan pelaporan.

Hambatan Dalam Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah di Kabupaten Indramayu

Berbicara tentang sebuah perangkat teknologi tentunya akan menemui hambatan dalam penerapannya di kemudian hari adapun hambatan-hambatan yang akan ada yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

Dalam mengoperasikan sebuah teknologi tentu harus di dukung oleh sumber daya manusia yang handal, kemahiran personil dalam menggunakan aplikasi teknologi sudah tentu idealnya harus mempunyai prakualifikasi pendidikan IT selain itu rawannya mutasi para pegawai yang akan berdampak dalam mengoperasikan SIMDA karena membutuhkan tambahan waktu untuk memberikan pelatihan-pelatihan dalam menjalankan aplikasi SIMDA yang senantiasa *up to date*.

2. Software dan Jaringan

Masalah terkait software dan jaringan merupakan masalah yang paling krusial dalam penerapan sistem antar instansi masih seringkali belum terintegrasi dengan baik. Yakni antara Bank, Dispenda (BP2RD) dan BKD Indramayu selaku operator SIMDA Keuangan. Masalah umum, yang belum tersinkron ialah *query*. Query adalah semacam kemampuan untuk menampilkan suatu data dari database dimana mengambil dari tabel-tabel yang ada di database, namun tabel tersebut tidak semua ditampilkan sesuai dengan yang kita inginkan serta data apa yang ingin kita tampilkan. *Query* ini bahasa umumnya dalam praktiknya dalam SIMDA dikenal sebagai uraian detail dari suatu bukti transaksi uang masuk. Rincian belum jelas mengenai apa saja yang menjadi tipe pembayaran. Seperti contohnya, pendapatan yang masuk tidak bisa dibedakan dari tipe mobil (misalnya jip, sedan, ataupun minibus) bahkan motor, dan asal pendapatan (Pajak, denda, jasa raharja).

KESIMPULAN

Output yang dihasilkan dalam Penerapan SIMDA Keuangan di Kabupaten Indramayu yaitu Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk bagian penganggaran. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk bagian penatausahaan. Dan, jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca untuk bagian akuntansi dan pelaporan. Maka tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan ini untuk menghasilkan laporan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya.

REKOMENDASI

1. Melakukan program-program pelatihan secara berkala bagi para pegawai-pegawai honorer, pegawai pindahan dan mempunyai materi pelatihan yang terupdate untuk menyamaratakan standar kualifikasi pegawai dalam mengoperasikan sistem ini.
2. Melakukan pengintegrasian secara online seluruh satuan kerja (SKPD) pengguna SIMDA Keuangan yang ada dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Indramayu.

REFERENSI

- Burhan Bugin. 2008 *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Jogiyanto, Hartono. 1999. *Analisis Dan Disain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi

- Satries, W.I. 2011. *Efektivitas Program Pmeberdayaan Pemuda pada Organisasi Kepemudaan Alfatih Ibadurrohman Kota Bekasi*. Tesis. Universitas Indonesia,Salemba.
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sutanta, Edhy. 2003. *System Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Informasi Keuangan Daerah.